**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum berdasarkan UU otonomi pemerintahan daerah No. 32 Tahun 2004, diberlakukannya kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah mulai terhitung pada tanggal 1 Januari 2001, yaitu kebijakan yang menggambarkan pemerintahan yang sangat demokrasi dan dapat memenuhi aspek desentralisasi yang sesuai. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelayanan masyarakat maka desentralisasi dibutuhkan juga untuk merealisasikan pengembangan kehidupan demokrasi keadilan, pemerintahan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Sidik, (2002) dalam Adi (2007).

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, akuntabilitas publik merupakan hal yang penting. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk menjawab semua tuntutan masyarakat sekaligus menciptakan daya tahan pembangunan daerah, Syarifuddin (2015). Otonomi daerah memiliki visi guna mengelola aktivasi bantuan distribusi kebijakan pembangunan nasional hingga ke pemerintah tingkat provinsi, jadi pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat daerah. Dewi (2002), menjelaskan jika perwujudan otonomi daerah dapat berlangsung dengan baik harus melihat sumber pendapatan daerah, struktur organisasi pemerintah daerah, dukungan hukum, faktor kepemimpinan, teknologi dan perilaku masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Tuntunan peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi besar sesuai dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada daerah disertai pengalihan pembiayaan, peralatan, personil dan dokumen (P3D) ke daerah dalam jumlah yang besar. Sedangkan, hingga saat ini dana perimbangan adalah merupakan transfer keuangan bagi pemerintah ke daerah dalam rangka mendukung perwujudan otonomi daerah, walaupun hasilnya relatif mencukupi tetapi daerah wajib lebih kreatif dalam menunjang Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasan dalam pembelanjaan APBD-nya Sidik (2002) dalam Adi (2007). Maka dari itu, daerah wajib dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensial secara maksimal tetapi harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan *high cost economy.*

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin mandiri daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah. Penerimaan keuangan yang dihasilkan dari memaksimalkan sumber penerimaan keuangan. Di harapkan menjadi fokus oleh pemerintah dan dapat di alokasikan dalam bidang pembangunan dan menutupi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh dari hasil pendapatan asli daerah diantaranya berasal dari retribusi daerah Putra, dkk (2014).

Sumber pendanaan perwujudan pemerintahan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil kekayaan perusahaan daerah yang dipisahkan/BUMD. Diharapkan sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan perusahaan daerah yang dipisahkan/BUMD diharapkan agar dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Nugroho (2014). Mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah telah banyak dilakukan, tetapi masih sedikit yang melakukan penelitian dengan mengambil 3 dari 4 sumber-sumber Pendapatan asli daerah tersebut sebagai variabel penelitian khususnya di Sulawesi Tenggara. Hal ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fiqih (2010), Nugroho (2014), dan Efendi (2011). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan bahwa penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan hasil usaha lainnya yang sah sudah terealisasi sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan dikota Tanggerang 2004-2008. Jadi, peneliti menginisiatif untuk melakukan penelitian yang sama dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fiqih (2010).

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang telah dilakukan oleh Fiqih (2010). Menggunakan 3 variabel yaitu:: pajak ddaerah, retribusi ddaerah dan hhasil kekayaann perusahaan daerahh yang dipisahkan//BUMD. Alasan peneliti mereplikasi penelitian yang telah dilakukan adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian saat ini. Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian tersebut yaitu pada perbedaan objek penelitian yang dilakukan di provinsi Sulawesi Tenggara serta periode penelitian yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan meneliti 12 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara, keterkaitan Pendapatan Asli Daerah pada ke 3 variabel independennya karena sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari 4 sumber penerimaan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Perusahaan yang Dipisahkan/BUMD dan PAD lainnya yang sah, tetapi dalam penelitian ini hanya mengambil 3 sumber penerimaan yang dijadikan sebagai variabel independen. Peneliti ingin menguji kembali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di 12 Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini dilakukan agar mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Pajakk Daerahh, Retribusii Daeraah, dan hHasil Kekayaann Perusahaan Daeraah yanng Dipisahkan//BUMD Terhadapp Pendapatann Aslii Daerahh. Peneliti tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Sulawesi Tenggara karena daerah tersebut memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, kemudian dari sektor hasil bumi yang cukup besar dan juga sumber-sumber pendapatan lainnya dari berbagai sektor, tidak hanya hasil bumi yang kaya dari daerah tersebut, dari sektor pertanian juga begitu besar, adapun hasil dari pertaniannya yakni, beras, cokelat, jagung, ubi kayu, nilam dan mericca dan masih banyak lagi. Tidak hanya dari sektor pertanian, Provinsi ini juga memiliki banyak tempat-tempat destinasi wisata yang tidak kalah menarik. Provinsi ini memiliki 17 kabupaten/kota dimana diantara 17 itu terdapat 5 daerah otonomi baru, yang pemekaran dibawah 5 tahun. Penelitian ini peneliti mengambil 12 Kabupaten/Kota sebagai sampel penelitian, mengingat ke 5 daerah tersebut masih tahap proses pembangunan dan belum memiliki pendapatan sendiri melainkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Penelitian ini akan membuktikan bahwa dari lima tahun periode sampel penelitian, akan melihat dari ketiga variabel bebas tersebut. Variabel manakah yang tidak memiliki peran atau pengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Dari paparan argumen diatas, Maka diajukan penelitian dengan judul penelitian adalah: **“Analisis Pengaruh Pajak daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Kekayaan Perusahaan Daerah Yang Dipisahkan/BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**

**1.2 Rumusan Masalah**

# Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sumber penerimaan pendapatan asli daerah, antara lain: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil Kekayaan Perusahaan Daerah Yang Dipisahkan/BUMD; Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

* + - 1. aApakah Pajakk daerahhh memiliki pengaruh terhadapp pendapatannn asli daeraahh?
      2. Apakah Retribusi daerahh memiliki pengaruh terhadap pendapatann asli daerahh?
      3. Apakah Hasil kekayaann perusahaan daerah yangg dipisahkan/BUMD memiliki pengaruhh terhadap pendapatan aslii daerah?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalahh penelitian diatass, maka diperoleh tujuann penelitian yang akann menjadi fokus penelitiann adalah sebagai berikutt:

1. Untukk mengetahuii apakah pajak daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah?
2. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah?
3. Untuk mengetahui apakah hasil kekayaan perusahaan daerah yang dipisahkan/BUMD memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah?
   1. **Manfaat Penelitian**
4. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu bagi peneliti serta peneliti dapat mengetahui dan mempelajari faktor-faktor demografi apa saja yang berpengaruh terhadap pajaak daerahh, retribusii daerah dan hasiil kekayaan perusahaaan daerahh yang dipisahkan//BUMD.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk riset dengan tema yang sama di masa depan melihat minimnya referensi yang sesuai dan spesifik dengan tema ini serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan terkait dengan penerimaan pajak khususnya pajakk daerah, retribuusi daerah dan hasiil kekayaann perusahaan daerah yangg dipisahkan//BUMD di daeraah khususunya di Provinsi Sulawesi Tenggara.